



ପରିଷ୍କାର ଗ୍ରାମୀନ ଜାତି
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏତାନୀ
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
କର୍ମଚାରୀ ପରିଷ୍କାର ଏତାନୀ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ଜାତି ଏତାନୀ ପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (୧୦୩୨୦୧) ପାତାନାଥାଳୀ (୧୦୩୨୦୨) ପ୍ରଦେଶ
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

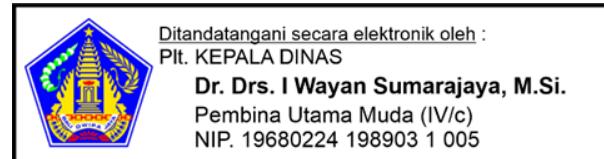
Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
di –
Tempat

DAFTAR PENGANTAR
Nomor: B.12.500.12.18.1/1613/SET/DPMD DUKCAPIL

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar Informasi Publik dan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.	1 (Satu) Eksemplar	Dikirim untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor B.14.500.12.18.1/1797/IKP/ D.KOMINFOS, Tanggal 06 Maret 2025, Hal Permohonan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Usulan Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025.

Bali, 10 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BSRE

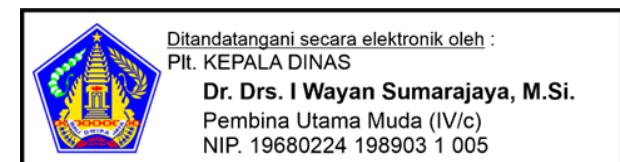




ପ୍ରଭାତ୍ରୀ ଭୂମିକ୍ରିତାନ୍ତି
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ଶିଳ୍ପିବ୍ୟାକାରୀ ମ୍ୟାଗାରି ଗତି
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
କ୍ଷେତ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବାରାତ୍ମକ ବିଭାଗ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ଜାନକୀ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ (ପଂଜାଇତା) ଯୋଗ୍ୟ ବିଭାଗ (ପଂଜାଇତା) ୧୯୫୫ ମେ ମାସ
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmdukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmdukcapil@baliprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Link Dokumen
						Cetak	Softcopy		
1	SOP DPMD DUKCAPIL 2024	Memuat tentang Standar Operasional Prosedur DPMD DUKCAPIL 2024	Sekretariat	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2025	✓	✓	1 Tahun	https://balikom.info/sopPMD2025
2	Buku Data Agregat Kependudukan Provinsi Bali Tahun 2023 Semester II	Memuat hasil pengelolaan data individu penduduk Provinsi Bali yang telah memiliki (NIK) melalui Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kadis PMD DUKCAPIL Prov. Bali	2024		✓	1 Tahun	https://balikom.info/Agregat2024smt2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ପାରିଷଦ୍ୟ ବ୍ୟାନିକ୍ ରାଜ୍ୟ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
କିମ୍ବା ବ୍ୟାନିକ୍ ରାଜ୍ୟ
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
କିମ୍ବା ବ୍ୟାନିକ୍ ରାଜ୍ୟ
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାନିକ୍ ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଟର୍ ପାରିଷଦ୍ୟ (ପାରିଷଦ୍ୟ) । ଜାତ୍ୟନ୍ଯବାଳୀ (ଦେଲାହା) । ୧୯୩୦୯
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI	Memorandum Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas.	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan .	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan.
2.		Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klarifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya .	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak Terbatas.	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan.	Melindungi kerahasiaan dokumen.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.		Data Perangkat Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 84 Tahun 2015 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6.		Data Badan Permusyawarahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 110 Tahun 2016 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
7.		Data Profil Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 12 Tahun 2007 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
8.		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 81 Tahun 2015 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9.		APBDesa.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 20 Tahun 2018 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
10.		SILTAP.	<ul style="list-style-type: none"> Permendagri No. 11 Tahun 2019 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/atau Mental, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk. 	Tidak Terbatas	Data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plt. KEPALA DINAS

Dr. Drs. I Wayan Sumarajaya, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680224 198903 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE

